

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DALAM PENGAWASAN PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M. SAPUTRA
NIM : 11720714880

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Analisis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengawasan Perfilman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman”*** yang ditulis oleh:

Nama : M, SAPUTRA
 NIM : 11720714880
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2021

Pembimbing Skripsi


H. Mohd. Kastulani, SH, MH
 NIP. 19630909 199202 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ *ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PENGAWASAN PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN*” yang ditulis oleh :

Nama : **M. SAPUTRA**
 NIM : 11720714880
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ABSTRAK

M. Saputra (2021) : Analisis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengawasan Perfilman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Sejauh yang masyarakat ketahui bahwa KPI bertanggungjawab dalam pengawasan perfilman setelah melihat kinerja mereka dalam pemberian surat teguran terhadap film “*Spongebob The Movie*” karena adanya adegan kekerasan yang ditampilkan di film tersebut. Begitu juga dengan film “*Gundala*” yang menampilkan beberapa kata kotor/kasar. Lalu, pada saat munculnya *trailer* film “*kucumbu tubuh indahku*” yang filmnya mengandung unsur LGBT. Saat masyarakat meminta KPI untuk memberikan teguran kepada film tersebut. Namun pihak KPI Pusat menjawab bahwasanya itu bukan tugas mereka.

Permasalahan yang menjadi kajian didalam penulisan skripsi ini adalah apakah KPI berwewenang menentukan boleh atau tidaknya penayangan perfilman sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman ? dan apakah sudah sesuai tugas dan wewenang KPI menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam pengawasan perfilman ? dan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui apa saja wewenang oleh setiap Lembaga Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya serta agar dapat membedakan tugas masing-masing lembaga Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil analisis berbagai aturan perundang-undangan, putusan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel karya ilmiah, *website* serta bahan hukum lainnya berupa kamus dan diolah dengan metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Perfilman ketika film tersebut dalam proses pengurusan izin penayangan dilakukan oleh Lembaga Sensor Film dengan memberikan surat izin lulus sensor ataupun ketika *trailer* atau film tersebut telah mendapatkan surat izin lulus sensor namun belum ditayangkan dalam ranah penyiaran. Dan ketika film tersebut ditayangkan di bioskop, TV, radio dan lain-lain maka itu merupakan tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia dengan memberikan surat berupa teguran kepada pihak pembuat film tersebut jika ditemukan pelanggaran. Begitu juga dalam UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman tidak mengatur mengenai kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini serta sholawat dan salam selalu penulis curahkan kepada junjungan semesta alam Nabi besar Muhammad SAW dengan keindahan ajaran dan ilmu yang disebarkannya dengan “*Allahumma shali'ala sayyidina Muhammad, Wa'ala ali Sayyidina Muhammad*”.

Skripsi dengan judul “**Analisis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengawasan Perfilman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman**” merupakan judul karya ilmiah yang dicitakan oleh penulis untuk segera menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada penulis, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Mara Sakti dan Ibunda tercinta Rumondan Harahap, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan moril dan materiil dan nasehat untuk selalu berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita sehingga sampai penulis dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riau. Kemudian juga terima kasih untuk abang, kakak dan adik serta keluarga besar yang berkontribusi besar terhadap penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCI selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S.Ag. M.Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag M.A selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
 4. Bapak Firdaus SH.,MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag, SH.,M.Hum selaku sekretaris jurusan yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
 5. Bapak H. Kastulani SH.MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi begitu besar kepada penulis.
 6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepatnya.

7. Sahabat serta teman-teman Ilmu Hukum, teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara, teman-teman KKN Sipirok dan juga teman-teman yang berkontribusi dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 26 April 2021

Penulis

M. Saputra
NIM. 11720714880

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data	16
a. Studi Pustaka dan Dokumen.....	16
4. Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN	20
A. Pengertian Hukum.....	20
B. Tujuan Dan Fungsi Hukum	26
C. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman....	29
BAB III KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN LEMBAGA SENSOR FILM	31
A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia	31
B. Profil Lembaga Sensor Film	35
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
A. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Penentuan Penayangan Perfilman	41
1. Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia	43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia.....	45
3. Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia.....	46
4. Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film	47
5. Wewenang Lembaga Sensor Film.....	47
6. Tugas Lembaga Sensor Film	48
B. Pelaksanaan Pengawasan Perfilman oleh KPI Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terhadap Tayangan Perfilman	55
1. Hubungan Antara Penyiaran dan Perfilman	55
2. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pada Perfilman Dalam Ranah Penyiaran	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perfilman didefinisikan sebagai berbagai hal yang berhubungan dengan film. Film memiliki definisi sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan¹. Ini adalah definisi Film dan Perfilman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

UU Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sebab upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2009 oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta.

¹ <https://akutahu.com/post/komisi-penyiaran-indonesia-lembaga-sensor-film> diakses pada tanggal 17 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060. Agar semua orang mengetahuinya.

Film diartikan sebagai lakon hidup atau gambar gerak yang biasanya juga disimpan dalam media seluloid tipis dalam bentuk gambar negatif.² Meskipun kini film bukan hanya dapat disimpan dalam media selaput seluloid saja. Film dapat juga disimpan dan diputar kembali dalam media digital.

Adegan-adegan yang ditimbulkan oleh orang-orang film dibuat senyata mungkin. Apabila penonton sudah tahu maksud pesan yang disampaikan, maka penonton biasanya mengeluarkan apresiasi dengan menangis dan tertawa. Pada saat menyaksikan film, ada istilah peralihan dunia³.

Seiring berkembangnya dunia perfilman, semakin banyak film yang diproduksi dengan corak yang berbeda-beda. Secara garis besar, film dapat diklasifikasikan berdasarkan cerita, orientasi pembuatan, dan berdasarkan genre. Berdasarkan alurnya, ada film panjang dan film pendek.

Seni, estetika, dan makna merupakan tolak ukur pembuatan film. Kemudian klasifikasi berdasarkan genre film itu sendiri. Terdapat

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, (Jakarta : Erlangga, 1987), hal 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam genre film yang biasa dikenal masyarakat selama ini, diantaranya: *Action*, *Komedi*, *Drama*, *Petualangan*, *Epik*, *Musikal*, *Perang*, *Science Fiction*, *Pop*, *Horror*, *Gangster*, *Thriller*, *Fantasi*, *Disaster* / *Bencana*.⁴

Kekuatan dan kemampuan sebuah film menjangkau banyak segmen sosial, membuat film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak. Film merupakan dokumen kehidupan sosial sebuah komunitas yang mewakili realitas kelompok masyarakat. Baik realitas bentuk imajinasi ataupun realitas dalam arti sebenarnya. Perkembangan film begitu cepat dan tidak terprediksi, membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya yang progresif.

Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan gambar atau suara tertentu.⁵ Lembaga Sensor Film (LSF) adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film-film di Indonesia. Sebuah film hanya dapat diedarkan jika dinyatakan lulus sensor oleh LSF. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman melahirkan/membentuk lembaga yang dinamakan Lembaga Sensor film yang keabsahannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

⁴ LaRose, et.al. media now. Boston, USA. 2009

⁵ *Himpunan Peraturan Tentang Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Tamita Utama, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejauh yang masyarakat ketahui bahwasanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lah yang bertanggung jawab dalam masalah pengawasan perfilman yang ditayangkan di beberapa bioskop dan di Siaran Televisi Indonesia. Maka dari itu perlu penulis jelaskan mengenai sejarah Pembentukan KPI.

KPI dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik sehingga harus dikelola oleh badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Semangat baru ini berbeda dengan landasan dalam UU Penyiaran sebelumnya, yakni UU No. 24 Tahun 1997 Pasal 7, yang menyatakan bahwa penyiaran dikuasai oleh negara, pembinaan dan pengendaliannya pun dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang tercatat,⁶ semangat lama tersebut menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu (Orde Baru) merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan pemerintah. KPI yang dibentuk pasca Reformasi 1998 atau setelah tumbang rezim Soeharto ingin menjadi lembaga penyiaran yang berbeda seiring dengan semangat perubahan dan demokrasi. Proses demokratisasi menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Lantaran frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Artinya, masih dikutip dari situs KPI, media penyiaran harus

⁶ dalam website KPI di akses pada tanggal 18 November

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat, baik yang berupa berita, hiburan, dan lainnya.

Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (Prinsip Keberagaman Isi) dan *Diversity of Ownership* (Prinsip Keberagaman Kepemilikan). Dua prinsip inilah yang konon menjadi landasan bagi setiap kebijakan KPI.

KPI punya beberapa kewenangan. Salah satunya, dikutip dari *Lembaga-Lembaga Negara Independen* (2019)⁷ karya Laurensius Arliman Simbolon, adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran. Itulah yang telah dilakukan KPI terhadap *Spongebob*, Gundala, dan beberapa program televisi/radio lainnya baru-baru ini.

Jangan lupa, KPI juga punya tugas untuk berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segala bentuk apresiasi publik terhadap lembaga penyiaran maupun dunia penyiaran pada umumnya.

KPI menyatakan mengusung semangat baru untuk lepas dari kesan bahwa penyiaran merupakan bagian dari instrumen kekuasaan sehingga kini lebih berpihak kepada publik. Tulisan Ade Armando dalam buku *Televisi Jakarta Diatas Indonesia* (2011) barangkali bisa membuka perspektif lain ihwal KPI.

⁷Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2019) hlm., 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimanapun, tulis Ade,⁸ kalau dibaca isi UU, terlihat bahwa muatan tentang KPI sebenarnya jauh lebih dominan. Kesannya, KPI adalah pengendali utama, sementara pemerintah lebih dalam posisi menjaga agar jangan sampai KPI menjadi "pemegang kekuasaan mutlak". KPI memang sengaja dirancang sebagai lembaga independen. Bahkan, tulis Ade, KPI lebih independen daripada *Federal Communications Commission* (FCC), lembaga serupa di Amerika Serikat.

Seperti kita ketahui kini industri film Indonesia tengah berkembang cukup pesat dibuktikan dengan ragam dan kualitas film buatan dalam negeri yang dapat kita nikmati di bioskop yang mengundang banyak tanggapan positif dari masyarakat.

Pasal 1 angka 2 PERMENDIKBUD No 30 Tahun 2019 berbunyi⁹ :
"film indonesia adalah film yang dibuat oleh pelaku kegiatan pembuatan film atau pelaku usaha pembuatan film, yang sebagian besar pembuatannya menggunakan sumber daya indonesia, serta keseluruhan atau sebagian besar kekayaan intelektualnya dimiliki oleh warga Negara indonesia atau badan hukum indonesia."

Akan tetapi dalam perkembangannya, UU Perfilman mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan di bidang perfilman ini terjadi dikarenakan berbagai aturan yang ada dalam UU Perfilman tidak dapat

⁸ <https://tirto.id/sejarah-dan-tugas-kpi-menegur-gundala-spongebob-eibR> diakses pada tanggal 18 November 2020

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2019 Pasal 1 angka (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan atau diimplementasikan. Selain itu, UU Perfilman dirasa belum menyesuaikan dengan perkembangan dunia perfilman saat ini.

Media film dan sinetron sebenarnya bersifat *entertainment* (hiburan), bahkan bersifat komersial.¹⁰ Namun, tidak semua film yang telah dibuat dapat ditayangkan dihalayak umum, khusus bagi anak-anak, dilarang bagi anak-anak atau film khusus orang dewasa saja. Seperti halnya film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ yang dilarang oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus, melarang bioskop di Pekanbaru menayangkan Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’. “kami sudah terbitkan surat edaran untuk seluruh bioskop di Pekanbaru untuk tidak memutar film itu”, ujar Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, kepada Gatra.com, Selasa (07/05/2019)¹¹. Firdaus menyebut, film itu tidak layak ditonton oleh masyarakat di Kota Pekanbaru yang madani.

Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok Jawa Barat KH A Dimiyati Badruzaman di Depok mengatakan film tersebut tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan ditengah masyarakat, khususnya dengan prinsip dan nilai-nilai agama islam.

“MUI Kota Depok sangat keberatan film yang disutradarai Garin Nugroho itu ditayangkan dibioskop dan ditonton masyarakat Kota Depok,” katanya, Sabtu (27/4/2019).

¹⁰ Rati Purwasih, Skripsi: *Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor (LSM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, lampung: Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, h. 121

¹¹ <https://www.gatra.com/detail/news/414556/gaya%20hidup/film-kucumbu-tubuh-indahku-dilarang-tayang-di-pekanbaru> di akses pada tanggal 18 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat tertanggal 25 april 2019 dan ditanda tangani oleh Ketua MUI Kota Depok Dimyati Badruzaman dan Sekretaris Nurwahidin ini menjelaskan film itu dinilai berpotensi bisa merusak generasi muda islam di Kota Depok untuk perilaku seks bebas dan menyimpang.¹²

Bukan hanya Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Ketua MUI Kota Depok saja yang menyatakan untuk tidak ditayangkannya film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ tersebut, melainkan sebagian masyarakat juga. Namun, Masyarakat yang sadar akan film tersebut menyampaikan aspirasinya kepada Komisi Penyiaran Indonesia yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 36, RT.7/RW.2, kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120. Sebagian masyarakat tersebut meminta KPI agar menyikapi permintaan dari sebagian masyarakat yang menginginkan agar KPI bertindak atas beredarnya film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’.

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pada sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberikan surat teguran kepada Sutradara Film Gundala. Baru-baru ini, *hashtag* atau tagar #BubarkanKPI menjadi *trending topic* di Twitter Indonesia lantaran adanya sanksi teguran kepada Kartun *Spongebob* dan promo Film Gundala dalam surat keputusan dengan Nomor 385/K/KPI/31.2/09/2019.¹³ KPI menilai, Film *Spongebob Squarepants*

¹² <https://tirto.id/alasan-mui-depok-dukung-larangan-putar-film-kucumbu-tubuh-indahku-dnc6> di akses pada tanggal 29 Maret 2021.

¹³ <https://tirto.id/sejarah-dan-tugas-kpi-menegur-gundala-spongebob-eibR> diakses pada tanggal 18 November 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Movie yang ditayangkan di GTV yaitu salah satu siaran televisi lokal swasta milik MNC Group pada 22 Agustus 2019 lalu.

Salah satu hal yang paling mendasar yang membuat penulis tertarik dalam masalah ini adalah pada saat masyarakat meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melayangkan Surat Teguran Kepada Sutradara Film “Kucumbu Tubuh Indahku” dalam sebuah wawancara, lantas KPI mengatakan bahwasanya “itu bukan tugas kami” tegas Ketua KPI Bapak Agung Suprio, (Garin Nugroho, 2019)¹⁴. Sehingga memberikan pertanyaan apakah KPI berwenang menindak hal tersebut untuk menentukan boleh atau tidak ditayangkannya film tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Melihat latar belakang yang dikembangkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kinerja KPI dalam pengawasan perfilman, Sehingga penulis mengangkat judul skripsi “ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PENGAWASAN PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu menganalisa wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengawasan Perfilman Berdasarkan

¹⁴ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35103-penjelasan-kpi-atas-tuntutan-sebagian-masyarakat-untuk-menghentikan-peredaran-film-kucumbu-tubuh-indahku?start=3&detail3=5210> diakses pada tanggal 18 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman saja. Bukan permasalahan yang berhubungan dengan media sosial berupa siaran langsung dan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah KPI berwenang menentukan boleh atau tidaknya penayangan perfilman sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman ?
2. Apakah telah sesuai pelaksanaan pengawasan perfilman oleh KPI menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terhadap tayangan perfilman ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja wewenang oleh setiap Lembaga Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.
2. Agar dapat membedakan tugas masing-masing lembaga Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara Teoritis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama berkaitan dengan masalah tugas dan wewenang Lembaga Negara terutama Komisi Penyiaran Indonesia.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara Praktis
- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), terutama yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan fungsi suatu lembaga Negara.
 - 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa saja tugas, fungsi, dan wewenang suatu lembaga Negara sehingga tidak salah dalam menentukan tempat menyampaikan aspirasi.
 - 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

E. Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian *doktriner*, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Atau bisa juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti¹⁵.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk melihat permasalahan penyesuaian tugas dan wewenang suatu lembaga sesuai undang-undang yang mengatur dan membentuk lembaga tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan terhadap sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai informasi tentang konsep yang akan diteliti. Dalam pendekatan konseptual ini, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran para ahli Hukum Tata Negara terkait dengan tugas dan wewenang suatu lembaga Negara.

c. Pendekatan Analisis Nilai (*Values Analysis Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pemikiran logis dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku¹⁶. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.¹⁷

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu;

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Atau bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.156-160

¹⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri.
- 6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- 7) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait dengan hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum¹⁸. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen resmi. Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan, permasalahan. Kegunaannya untuk memberi semacam petunjuk inspirasi kepada penulis, ke arah mana penulis akan melangkah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu aktivitas tertentu. Dalam hal ini, studi pustaka dan dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi yang masih berkorelasi dengan penelitian ini, dan juga dari beberapa referensi buku dan juga artikel yang membahas mengenai dunia perfilman Indonesia dan dokumen-dokumen resmi pemerintah.

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dan Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu. Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulisan dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Hukum, tujuan dan fungsi hukum, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : PROFIL KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN LEMBAGA SENSOR FILM.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Profil KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan LSF (Lembaga Sensor Film) menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman yang membentuknya.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan peranan KPI yang mengatakan bahwasanya dalam masalah perfilman merupakan bukan tugas dan wewenang mereka, terutama dalam pengawasan perfilman, sehingga akan dibahas mengenai kebenaran dari pernyataan tersebut menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman serta dilengkapi dengan mencantumkan tugas dan wewenang masing-masing lembaga.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN

A. Pengertian Hukum

Hukum sebagai objek “Ilmu Hukum” harus dapat didefinisikan atau mempunyai definisi, yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai “Ilmu Hukum” agar yang belajar hukum mampu membedakan antara disiplin ilmu hukum yang dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainnya.¹⁹

Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut *law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti Raja atau perintah Raja. Istilah-istilah tersebut *recht*, *rectum*, *rex* dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti “hukum”.²⁰

Istilah *law* (Inggris) dari bahasa Latin *lex* atau dari kata *lesere* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. *Lex* juga dari istilah *legi* berarti peraturan atau undang-undang. Peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut legal atau *legi* yang berarti “undang-undang”. Dengan

¹⁹ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta, Sinar Grafika: 2014), h. 7.

²⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, istilah *law* (Belanda), *gesetz* (Jerman), selain berarti “hukum” juga berarti “undang-undang”.²¹

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam penelusuran kepustakaan tentang filsafat, teori dan ilmu-ilmu hukum banyak ahli-ahli filsafat dan ahli hukum yang telah memberikan definisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemahamannya tentang hukum. Memang ditemui perbedaan formulasi rumusan antara satu dengan lainnya, dan hal itu sangat wajar-wajar saja dalam kajian keilmuan jika ditemukan beberapa definisi untuk suatu objek dari sumber-sumber yang berbeda.²²

Bahkan tidak ada larangan dalam konteks keilmuan jika dulu yang berpendapat tentang hukum tidak dapat didefinisikan, sekarang merubah pendapatnya dengan mengatakan hukum harus dapat didefinisikan dan dicobanya untuk memberikan suatu definisi. Juga tidak ada larangan yang dulu memberikan definisi tentang hukum kemudian memberikan definisi yang baru yang lain dari sebelumnya (mereview). Hal ini dapat dicermati bagaimana Van Vollenhoven dalam memberikan definisi berkenaan dengan hukum administrasi negara sekitar tahun 1927-an. Teorinya itu dikenal dengan Teori Residu.

Pengenalan dan bahkan pemahaman tentang definisi sangat diperlukan untuk mengantar dan memberikan orientasi lebih lanjut untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang objek ilmu yang dipelajari, maka demikian pula halnya tentang definisi hukum.

²¹ *Ibid*

²² *Opcit, Nurul Qomar, h. 7.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan dihadapan hukum sehingga bisa diartikan hukum sebagai ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi yang melanggarnya.

Grotius pada tahun 1625 dalam "*De Belli ac facis*" mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Van Vollenhooven dalam tulisannya "*Het Adatrecht van Netherland Indie*" mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya.

Jadi hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yaitu:

1. E. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*; “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”
2. A. Ridwan Halim dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab* menguraikan: Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”
3. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum* mengatakan: “Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia didalam hidup bermasyarakat.”
4. E. Mayers, dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgelijk Recht*, menulis: “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Immanuel Kant, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap*: “Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”
6. Leon Duguit, dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional*: “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.”
7. J. Van Apeldorn, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Netherlandse recht*: “Tidak mungkin memberikan defenisi kepada hukum karena begitu luas yang diaturnya. Hanya pada tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai.”
8. Grotius pada tahun 1625 dalam “*De Belli ac facis*” mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.
9. Van Vollenhooven dalam tulisannya “*Het Adatrecht van Netherland Indie*” mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Immanuel Kant, mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak bebas dari orang lain.
11. J. Van Kant, dalam bukunya *“Inleiding tot de Rechtsweten schap”* mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.
12. Rudolf von Jhering, dalam bukunya *“Der Zweek in Recht”* mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.
13. Duguit, mengemukakan bahwa hukum merupakan aturan tingkah laku para warga masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar ketentuan itu.
14. Hans Kelsen, dalam bukunya *“Reine Rechtslehre”*, menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaidah-kaidah menurut mana orang harus berlaku.

Dari pendapat para sarjana diatas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian didalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tujuan Dan Fungsi Hukum

Doktrin tentang tujuan hukum semua banyak dilontarkan oleh ahli filsafat hukum, sehingga ada pandangan yang menyatakan bahwa filsufis hukumlah yang menggagas pemikiran tentang apa tujuan hukum itu.²³

Namun dalam perkembangannya, lahir pemikir-pemikir ilmu hukum dan praktisi hukum dari kalangan yang sudah ahli di bidangnya yang mencoba merumuskan tentang apa tujuan asasi dari hukum. Ahli hukum telah mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum, yang sudah lazim didengar tidak lain, adalah keadilan, kemanfaatan atau kefaedahan dan kepastian.

Sebelum diurai lebih lanjut tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tujuan hukum yang fundamental, maka dikemukakan beberapa pemikiran filsuf sebagai berikut:

1. Van Kan, J, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat.
2. Bellefroid, J.H.P, mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota dalam suatu masyarakat.

²³ *Ibid*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bentham, J, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi untuk menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat.
4. Prof. Utrecht, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.²⁴

Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal dari pada hukum, oleh Gustav Radbruch, dinamainya dengan “Tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Prof. Achmad Ali, dalam bukunya “Teori Hukum” menyatakan bahwa apa yang disebut oleh Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, merupakan tujuan hukum dalam arti yang luas universal.

Karenanya dalam tataran penerapan hukum, menurut Gustav Radbruch, harus dianut skala prioritas, pertama wajib mendahulukan keadilan baru kemudian kemanfaatan dan kepastian.

Namun yang ideal, adalah agar kiranya dalam penerapan hukum senantiasa mensinergikan antar ketiga tujuan hukum dimaksud, supaya ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada pengabaian dan kepincangan antar suatu dengan lainnya. Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan

²⁴ Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Cet.IV. PT.Citra Aditya. Bandung.h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu, kemudian baru berpikir untuk kemanfaatannya dan kepastiannya.

Tiga tujuan fundamental hukum sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dari segi teori, dikenal sebagai berikut:

1. Tujuan hukum sebagai keadilan, dibahas dalam teori etis (*Etische Theory*).
2. Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam teori utilitas (*Utiliteits Theory*).
3. Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori positivisme hukum (*Legal Positivism Theory*).²⁵

Tujuan hukum harus dibedakan dengan fungsi hukum, jika tujuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka fungsi hukum merupakan alat untuk perwujudan tujuan-tujuan hukum tersebut. Hukum sebagai alat secara teori bisa dikemukakan oleh ahli mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. *Law is a tool of Social Regulation.*
2. *Law is a tool of Social Control.*
3. *Law is a tool of Social Enggenering.*
4. *Law is a tool of Social Developmen.*
5. *Law is a tool of Social Regulation.*

Dalam istilah lain, yang menyatakan fungsi hukum antara lain sebagai berikut:

²⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h.32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia.
2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat.
3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (lahir batin).
4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial (penggerak pembangunan).
5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis).
6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian.²⁶

C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473). Terdapat 90 Pasal dan 14 Bab dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Kebijakan komunikasi dibuat salah satunya agar masyarakat selamat dalam proses komunikasi. Undang-undang merupakan salah satu bentuk kebijakan. Peraturan Perundang-undangan dibuat dibuat berdasar pada Pancasila, dan materi isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia.

Salah satu kebijakan komunikasi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. UU Perfilman

²⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53; SP., *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan kebijakan yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan perfilman di Indonesia, salah satunya yaitu memuat aturan tentang masyarakat. Masyarakat yang diposisikan sebagai penonton dan konsumen film mempunyai hak dasar yaitu hak konsumen yang secara universal sudah diakui. Penelitian ini hendak melihat perlindungan penonton film yang didasarkan pada hak-hak konsumen yang diambil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan UU Perlindungan Konsumen.²⁷

²⁷ http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/66529 di akses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13.15 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN LEMBAGA SENSOR FILM

A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia

Perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme, menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Muncul kemudian lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Selain lembaga-lembaga Negara yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer, ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden.

Salah satu lembaga Negara tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Fokusnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, pada Pasal 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.²⁸

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).²⁹

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat undang-undang ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*)

²⁸ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.

²⁹ *Ibid*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.³⁰

Perkembangan industri media informasi di era reformasi dan demokrasi ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat sekali, bahkan terkesan tidak terkontrol dengan baik dan serius oleh para penegak hukum. Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat diberbagai lapisan sosial, terutama dimasyarakat kota. Sebagaimana sifat media informasi, media massa selain mengandung nilai manfaat sebagai alat transformasi, juga sering disalahartikan menjadi media informasi yang ampuh menebarkan nilai-nilai baru yang tidak diharapkan masyarakat itu sendiri dalam artian yang negatif. Untuk meningkatkan daya saing suatu media massa, tak jarang media massa menggunakan berita atau gambar erotika dan/atau porno bahkan menampilkan kekerasan baik berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis sebagai daya tarik media tersebut. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan media penyiaran sehingga kebebasan berekspresi justru mengalami penurunan kontrol sosial baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan moral yang sangat signifikan.

³⁰ *Ibid, hlm. 9.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaca pada masalah tersebut, Lembaga yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia sudah seharusnya membatasi para “kreator” dibidang penyiaran khususnya televisi, pembatasan memunculkan aturan-aturan yang berupaya mencegah adanya berita atau gambar erotika dan/atau porno dan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis tersebut yang dinamakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Harus disadari potensi negatif tidak hanya terdapat didalam dunia penyiaran, namun juga terdapat pada kegiatan perfilman. Penyiaran sangat identik dengan perfilman karena tak jarang televisi menyuguhi konten yang ada didalamnya dengan film untuk keperluan program acaranya.

Film merupakan media komunikasi massa efektif yang dapat merepresentasikan suatu hal baik secara *audio* maupun *visual* yang dibuat sehidup dan semenarik mungkin sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh “si pembuat” mudah dipahami oleh *audience*. Selain media komunikasi massa yang efektif, film juga merupakan media multifungsional yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, komersil, dan lain-lain. Dikarenakan keefektifan dan multifungsionalitas film tersebut maka tidak heran jika film dapat menjaring beragam *audience* dari berbagai lapisan masyarakat. Pengaturan yuridis mengenai perfilman Indonesia saat ini dituangkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis yang dimaksud dengan film sebagaimana definisi undang-undang adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.³¹ Berdasarkan definisi tersebut dapat ditemukan kata-kata bahwa film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial.

B. Profil Lembaga Sensor Film

Pada masa kemerdekaan Indonesia lembaga sensornya pun mengalami perubahan fungsi dan nama. Terdapat dua lembaga dalam masa ini, yang pertama dibentuk oleh NICA dengan nama Panitia Pengawas Film dari menghidupkannya lagi Film *Commissie*. Fungsi yang diterapkan oleh lembaga ini pun masih sama seperti Film *Commissie*. Sedangkan yang kedua Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan dan membentuk Badan Pemeriksaan Film. Fungsi dibentuknya Badan Pemeriksaan Film sebagai filter yang diberikan oleh propaganda pihak asing melalui film. Sehingga bangsa Indonesia diharapkan tidak terkomintasi akan propaganda seperti keberpihakan bangsa Indonesia kepada pihak penjajah.³²

Tahun terus berlalu, Indonesia pun akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan. Lembaga Sensor Film pun dipegang oleh pemerintahan Indonesia secara penuh. Pada tahun 1950 dibentuknya Panitia Sensor Film Pusat oleh pemerintah dengan tetap mengacu

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

³² *Academia Perjalanan Lembaga Sensor Film Indonesia*, (Diakses pada hari senin, 18 januari 2021), jam 08.45 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang diterapkan pada masa Hindia Belanda tetapi hanya ditambahkan beberapa saja sesuai stabilitas yang terjadi di Indonesia. Panitia ini ternyata berorientasi pada kepentingan kekuasaan belaka.³³

Pada tahun 1953 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 2 Juni 1953 Nomor 18977/Kab, pemerintah membentuk suatu Panitia Perancang Undang-Undang Perfilman (PPUF) yang pada tahun berikutnya PPUF diganti menjadi Dewan Film Indonesia dengan tugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam bidang Perfilman. Seiring berjalannya waktu pun lembaga sensor bukan merupakan lembaga yang mutlak. Lembaga ini harus mengikuti perkembangan jaman yang ada di Indonesia. Artinya lembaga ini bersifat luwes namun tetap pada Kontrol dari pemerintahan. Pada masa itu, pemerintah pun mendukung resolusi-resolusi MPRS tentang pers, radio, film dan TV.³⁴

Dibentuklah suatu lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF) yang mengatur tentang penyelenggaraan penyensoran film di Indonesia. Badan ini terdiri dari 24 orang perwakilan pemerintah dan Sembilan dari partai politik.³⁵ Adapun fungsi dan tugas BSF tetap menitik beratkan pada upaya menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film, dan memperjelas eksistensi dan fungsi film dalam turut memantapkan

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Budi Irwanto, *Film, Ideologi dan Militer Hegemoni di Sinema Indonesia*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 1999), h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program *nation and character building*. Film bisa menjadi elemen penting dalam pembangunan watak bangsa. Sebagaimana harapan Kurnianigrat kepada produser-produser nasional, agar film-film Indonesia hendaknya lebih mendekati kehidupan masyarakat sehingga disamping menghibur, film-film juga ikut dalam membantu membangun masyarakat dan Negara kita, juga agar produser lebih banyak menyajikan film-film ilmiah populer, film perjuangan bangsa, film-film hiburan sehat dan film anak-anak.³⁶

Sepanjang tahun 1970-an BSF membuka diri kepada masyarakat Indonesia. BSF menanamkan kepada masyarakat bahwa lembaga ini memang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hiburan yang layak tanpa pengaruh buruk dari film. Agustus 1971, BSF melakukan transparansi terhadap mekanisme yang dijalankan dengan menerbitkan buletin berskala BSF. Buletin diharapkan dapat diakses oleh publik terhadap cara kerja dan diskusi didalam BSF. Namun sayangnya, tahun 1973 buletin ini berhenti bukan dikarenakan alasan pendanaan ataupun ketiadaan minat pengelolanya. Melainkan mekanisme yang dilakukan BSF tidak lagi menjadi suatu rahasia. Jadi siapapun orang yang membaca buletin ini akan paham tentang mekanisme pensensoran film. Bagi orang yang ingin mengakses mekanisme tersebut dapat langsung meminta izin khusus dari Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film (Dirjen RTF).³⁷

³⁶ Academia Perjalanan Lembaga Sensor Film, Op.Cit

³⁷ Ibid, h. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan ini banyak mengalami perubahan anggota, termasuk perubahan anggota dari unsur pemerintahan. Tahun 1971 yang beriringan juga dengan melemahnya partai politik dalam sistem politik Indonesia, wakil dari unsur partai politik dikeluarkan dari BSF. BSF pada tahun 1971-1972 yang anggotanya meliputi seniman dan intelektual terkemuka, merupakan yang paling liberal dan terbuka sejak 1965. Pada tahun 1975 Badan Pembinaan Perfilman Daerah (BAPFIDA) didirikan pada tingkat provinsi yang dipilih oleh Gubernur, dan dikepalai oleh kepala wilayah departemen termasuk aparat keamanan dengan fungsi adalah untuk menjamin keamanan dari pangsa pasar yang adil ditingkat provinsi. Pada tahun 1977, wewenang BAPFIDA bertambah, lembaga ini berhak untuk menyensor film yang diputar di wilayahnya. Namun, hanya sekedar untuk melarang film tersebut beredar di provinsi dan untuk masalah pemotongan atau mengubah film tetap menjadi kewenangan BSF.³⁸

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55B/Kep/Menpen/75 Tanggal 20 Mei 1975, tugas BSF adalah sebagai badan penyensor pemerintah atas film yang akan diedarkan/dipertunjukkan kepada umum dan wilayah Indonesia yang akan diekspor. BSF sendiri mempunyai fungsi untuk mengeluarkan surat tanda lulus sensor film, menolak peredaran dan atau pengeksporan film, memotong bagian-bagian film, dan menarik film dari peredaran. Dalam laporan tahun 1975-1976, BSF dalam rangka mendapatkan respon dari masyarakat, yang

³⁸ *Ibid h. 91*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini adalah pejabat-pejabat pemerintahan serta para pemuka masyarakat, BSF mengirim tim-timnya ke daerah untuk mengetahui dan menampung secara langsung tanggapan-tanggapan dan reaksi-reaksi masyarakat atas hasil karya BSF serta keluhan-keluhan terhadap film dan jenis-jenis film tertentu yang dimanfaatkan oleh BSF sebagai bentuk evaluasi terhadap keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan BSF selanjutnya.³⁹

Sepak terjang dari BSF belum berhenti sampai disini, pada tahun 1977 Pedoman Sensor didasarkan pada Keputusan Menteri, salah satunya contoh yang ada diatas. Sementara itu pedoman lain yang ditetapkan oleh BSF sendiri yang disebut Kode Etik BSF pada 1980, yang kemudian diperluas dalam Kode Etik Produksi Film Nasional pada tahun 1981. Namun untuk permasalahan tugas dan fungsi, masih mengikuti pedoman kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 03A/Kep/Menpen/1977.⁴⁰

Aturan-aturan penyensoran telah menjadi detail, komprehensif dan bersifat publik, serta meningkatkan peran sensor dalam industri film dan juga kejelasan pembatasan regulasi pemerintah. Tugas penyensoran tidak hanya sekedar memotong atau menghapus apa-apa yang tidak patut ditonton oleh masyarakat, khususnya remaja dan anak-anak, tetapi sekaligus membimbing dan mengajak masyarakat untuk dapat

³⁹ Deppen, *Perfilman Indonesia*, (Jakarta, Deppen RTF, 1977), h. 314

⁴⁰ Budi Irwanto, *OP.Cit H.* 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan sikap kritis dalam dalam menapis atau lebih tepat lagi dalam melakukan *self censorship*.

Mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film terlalu terpaku dengan Orde Baru. Bahwa tema sebuah film yang tentang seks tidak boleh lebih dari 50 persen. Sayangnya, sineas ini adalah yang terpandai dikalangannya. Dengan tidak menampilkan cerita yang berbau seks sebanyak 50 persen atau hanya sebagian. Namun, dengan genre seperti itu banyak bertebaran di Indonesia.⁴¹

LSF kali ini sedang mengalami gelombang birokrasi. LSF masih direbutkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, ada kecenderungan LSF berada dinaungan Kemendikbud. Alasannya mudah karena film sangat dekat dengan unsur budaya. Seharusnya pemerintah tidak perlu merevisi segala undang-undang untuk perfilman, buatlah peraturan tentang pemantauan terhadap penonton film di pintu masuk tiap-tiap bioskop. Dengan regulasi yang seperti ini perlindungan kepada masyarakat Indonesia dapat berjalan. Seperti fungsi yang diuraikan LSF.⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Heru Effendy, *Industri Perfilman Indonesia*, (Jakarta, PT Gelora Aksara, 2008) h. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setelah dijelaskan secara lengkap mengenai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing lembaga Komisi Penyiaran Indonesia dan Lembaga Sensor Film. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan boleh atau tidaknya ditayangkan sebuah film ditentukan oleh Lembaga Sensor Film sesuai dengan kewenangan dan fungsinya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Atau dapat dikatakan juga bahwa fungsi Pengawasan Perfilman kewenangannya berada pada Lembaga Sensor Film ketika film tersebut belum ditayangkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa KPI tidak berwenang menegur sebuah film yang belum mendapatkan surat izin lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSM).
2. Begitu juga dengan tugas dan wewenang lembaga Komisi Penyiaran Indonesia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada saat pemutaran adegan sebuah film yang ditayangkan di siaran radio atau televisi, jika didapatkan suatu adegan yang tidak layak dipertontonkan atau ditayangkan, maka sudah sewajarnya lembaga Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa Surat Teguran kepada pihak produsen film tersebut, seperti yang terjadi pada film “*Spongebob Squarepants The Movie*” dan film “Gundala”. Dalam arti kata lembaga Komisi Penyiaran Indonesia melaksanakan tugas pengawasannya pada saat produk film tersebut telah mendapatkan Surat Izin Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film dan ditayangkan didalam siaran Televisi dan Radio.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Kepada Lembaga pembuat Undang-Undang, hendaknya membuat peraturan yang lebih jelas mengenai Perfilman dan Penyiaran yang mana kedua undang-undang tersebut memiliki keterkaitan yang erat terhadap objek berupa film agar tidak ada anggapan akan terjadi ketimpangan hukum.
2. Kepada Pemerintah dan Lembaga yang berwewenang khususnya Komisi Penyiaran Indonesia baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap perfilman agar terjaminnya mutu yang memang memberikan dampak positif terhadap hal-hal didalam kehidupan bermasyarakat, sehingga film-film yang dibuat layak dan dapat ditonton dan menjadi cerminan hidup dalam berkehidupan.

3. Kepada masyarakat, hendaknya agar lebih giat lagi dalam membaca dan memahami regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ada sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami sebuah aturan dan salah dalam bertindak sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Deppen, *Perfilman Indonesia*, Jakarta, Deppen RTF, 1977.
- Effendy, Heru. (2008) *Industri Perfilman Indonesia*, Jakarta, PT Gelora Aksara.
- Firmansyah et al, Assidiqie, Indrayana, dan Budiono. (2013) *Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019)*, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Deputi Bidang Kelembagaan & Sumber Daya Aparatur Negara, LAN, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. (2005) *hukum tata negara indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Irwanto, Budi. (1999) *Film, Ideologi dan Militer Hegemoni di Sinema Indonesia*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- I Made Pasek Diantha, (2016) *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Judhariksawan, (2010) *Hukum Penyiaran*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- La Rose,(2009) *et.al.media now*.Boston, USA.
- Laurensius Arliman Simbolon, (2019) *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- L. J. Van Apeldoorn, (2004) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- McQuail, Denis. (1987) *Mass Communication Theory*, Jakarta : Erlangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Masriani, Yulies Tiena. (2009) *Pengantar Hukum Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika.
- Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, (2013) *Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat* (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019), Deputi Bidang Kelembagaan & Sumber Daya Aparatur Negara, LAN, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. (2013) *Halal dan Haram*, Jakarta: Penerbit Jabal.
- R. Soeroso. (2004) *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 53; SP., Pengantar Ilmu Hukum, 24.
- Rahardjo, Satjipto. (1996) *Ilmu Hukum*. Cet.IV. PT.Citra Aditya. Bandung.
- Sobur, Alex. (2004) *Analisis Teks Media*, Bandung: Rosda Karya.
- Suratman dan Philips Dillah, (2014) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2013) *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tenriangke Muchtar Antonius Wiwan Koban, (2010) *Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara Pers, Buku, dan Film*, Jakarta: Freedom Institute.
- Widjaja, (2020) *Ilmu Komunikasi dan Pengantar Studi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Sumber Daya Dalam Negeri.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran.

C. JURNAL

Asip Suyadi, Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Lembaga Sensor Film Mengenai Kepastian Hukum Bidang Perfilman, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Universitas Pamulang: Agustus 2019.

Yeni Handayani, Mengembalikan Kejayaan Perfilman Indonesia Melalui Penyempurnaan Undang-Undang Perfilman, Jurnal, RechtsVinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional: juli 2015.

D. SKRIPSI

Rati Purwasih, Skripsi: Tugas dan Wewenang Lembaga Sensor (LSM) Dalam Perspektif Hukum Islam, lampung: Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anis Citra Murti, Skripsi: Efektivitas Fungsi Pusat Pengembangan Perfilman (Tahun 2015-2018), 2019.

Rinaldi Pradipta.A, Aminoto, Analisis Yuridis Pola Hubungan Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Bidang Perfilman Nasional, Universitas Gajah Mada : 2016.

E. WEBSITE

<https://akutahu.com/post/komisi-penyiaran-indonesia-lembaga-sensor-film>

<https://tirto.id/sejarah-dan-tugas-kpi-menegur-gundala-spongebob-eibR>

<https://72legallogic.wordpress.com/2009/03/27/tugas-dan-kewenangankomisipenyiaran-indonesia-kpi/>

[Academia Perjalanan Lembaga Sensor Film Indonesia.](#)

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/66529

<https://tirto.id/alasan-mui-depok-dukung-larangan-putar-film-kucumbu-tubuh-indahku-dnc6>

<https://tirto.id/alasan-mui-depok-dukung-larangan-putar-film-kucumbu-tubuh-indahku-dnc6>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ *ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PENGAWASAN PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN*” yang ditulis oleh :

Nama : **M. SAPUTRA**
 NIM : 11720714880
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Muslim, S. Ag, SH, M. Hum

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

.....

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PENGAWASAN PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 6 NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN, ditulis oleh saudara :

Nama : M. SAPUTRA
NIM : 11720714880
Program Studi : ILMU HUKUM
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : RABU 30-Desember 2020
Narasumber : MUSRIFAH SH.MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
Narasumber

Musrifah

Musrifah, SH., MH

NIR. 130 217 039

Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. SAPUTRA
 NIM : 11720714880
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 26 Juni 1997
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PENGAWASAN PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

membuat pernyataan



M. SAPUTRA

NIM 11720714880



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M. SAPUTRA
NIM : 11720714880
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
 DALAM PENGAWASAN PERFILMAN BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN

Pembimbing: H. Kastulani SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



M. Saputra, lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 1997. Anak pertama dari empat bersaudara dari bapak Mara Sakti dan Ibu Rumondan Harahap. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 101610 pada tahun 2009, kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pada MTS SWASTA AL ABRAAR Pada tahun 2012 dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas pada MAS AL ABRAAR pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 dengan Jurusan Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 11720714880.

Untuk lebih mendalami secara praktis mengenai Ilmu Hukum, Penulis melakukan praktek kerja lapangan (Magang) pada instansi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2019 dan di fokuskan pada ruang hukum oleh ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan melakukan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2020 di desa Sipirok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sebagai mahasiswa, penulis tentu saja harus menyelesaikan kewajiban akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) yang sudah lama diimpikan. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengawasan Perfilman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman”. Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang Munaqosah jurusan Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 09 juni 2021.